

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Deskripsi Teoritik

1. Hakikat Pengelolaan Wisata

a. Hakikat Pengelolaan

Pengelolaan destinasi wisata memang tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan kegiatan yang mendukung kepariwisataan. Menurut Terry (2013), menyatakan bahwa pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu diubah ke Indonesia menjadi “manajemen” atau “menejemen”. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Dalam prosesnya, manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen adalah suatu kegiatan pelaksanaannya adalah “managing”-Pengelolaan-, sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola”.

Menurut Leiper dalam Pitana (2009), Pengelolaan (manajemen) merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi pengelolaan tersebut meliputi: *Planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *directing* (pengarahan), dan *controlling* (pengawasan).

Menurut Handoko (2004), manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

b. Fungsi Pengelolaan Wisata

Berdasarkan penjelasan definisi di atas, bahwa pengelolaan memiliki definisi yang sama dengan manajemen. Terdapat beberapa fungsi pengelolaan. Terry (2013) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan istilah POAC, adalah sebagai berikut:

1) Planning (Perencanaan)

Menurut Terry (2013) perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Hasibuan (2009) perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena organizing, commanding, coordinating dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi.

Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah “memilih”, artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan.

Menurut Hasibuan (2009) tujuan dari perencanaan antara lain:

- a) Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur, dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan.
- b) Perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis, karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan.
- c) Perencanaan adalah satu usaha untuk memperkecil resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang.
- d) Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan.
- e) Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan.
- f) Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja.
- g) Perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian.
- h) Perencanaan merupakan usaha untuk menghindari *missmanagement* dalam penempatan karyawan.
- i) Perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi.

2) Organizing (Pengorganisasian)

Menurut Terry (2013) Organizing atau mengorganisir adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Sebenarnya, manusia adalah yang paling terdepan dalam pentingnya dan perhatian. Dengan cara mengorganisir, orang-

orang dipersatukan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang saling berkaitan. Tinjauan teratas dari “organizing” adalah untuk membantu orang-orang dalam bekerja bersama-sama secara efektif. Mengorganisir perlu karena kerja yang akan dilakukan adalah terlampau banyak untuk ditangani oleh seorang perorangan saja. Karena itulah, diperoleh pembantu-pembantu, dan diciptakan masalah memperoleh kegiatan kelompok yang efektif. Banyak otak, tangan dan kecakapan yang mungkin dihimpun, dan semuanya ini harus dikoordinasikan tidak saja untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan, tetapi juga dengan cara yang paling efektif.

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti telah diuraikan sebelumnya tentang Manajemen, Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.

Menurut Parhani (2016), fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Dengan kata lain pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Pengorganisasian mempermudah pemimpin dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang

bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan keputusan apa yang harus diambil.

3) Actuating (Pengarahan)

Menurut Terry (2013) "*Actuating*" atau pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota suatu kelompok, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok. Semua usaha kelompok memerlukan pengarahan, kalau usaha itu ingin berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok. Setiap anggota itu haruslah mempunyai informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas yang diserahkan. Untuk itu, rencana-rencana yang baik haruslah diberitahukan kepada semua anggota dalam bentuk instruksi-instruksi dan perintah-perintah yang diakui secara resmi.

Selanjutnya menurut Terry (2013) sebuah bagian penting dari pengarahan adalah memberikan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk. Perintah dan petunjuk dapat dimulai, diberhentikan atau membetulkan suatu kegiatan. Semua itu digunakan oleh para manajer sebagai alat pengarah, sebuah aturan adalah dalam sifat perintah, yang mengharuskan seorang bawahan untuk bertindak dengan cara tertentu dalam suatu keadaan tertentu.

4) Controlling (Pengawasan)

Menurut Terry (2013) pengawasan adalah bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan dilakukan dengan baik. Pengawasan berarti mengevaluasi pelaksanaan kerja dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil menurut rencana.

Menurut Handoko (2004) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat

kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian telah dilaksanakan secara efektif.

Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler dalam Handoko (2004) memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

2. Hakikat Pariwisata

a. Hakikat Pariwisata

Menurut UU RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Menurut *World Tourism Organization* dalam Arjana (2016) menjelaskan “*Tourism: activities of persons travelling to and staying in*

places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes". Sesuai dengan definisi tersebut pariwisata juga bisa diartikan sebagai kegiatan orang-orang untuk melakukan perjalanan ke dan tinggal disuatu tempat luar lingkungan biasanya untuk jangka waktu kurang dari satu tahun secara berturut-turut untuk memanfaatkan waktu senggang, urusan bisnis, dan tujuan lainnya.

Menurut Barth dalam Violetta Simatupang (2009), *Hospitality Law*: Pariwisata berarti semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar atau asing yang datang dan pergi dari dan ke suatu tempat, daerah atau negara dan segala sesuatunya yang ada hubungannya dengan proses tersebut seperti transportasi, makan minum, akomodasi, objek menarik, hiburan atraksi, serta jasa pelayanan lainnya.

b. Aspek-Aspek Pariwisata

Menurut Ardika (2003), Pembangunan pariwisata di Indonesia berprinsip pada Pariwisata Berbasis Masyarakat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pariwisata berwawasan budaya, dimana mencakup seluruh hasil cipta, rasa dan karya masyarakat, yang merupakan salah satu kekayaan utama Indonesia dan membawa pada keuntungan kompetitif. Pariwisata berkelanjutan, yakni menghormati dan melestarikan lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Ada empat aspek (A4) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut

1) *Attraction* (daya tarik);

Daerah tujuan wisata untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya. Semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti: pemandangan alam,

panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka. Selain itu, karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan juga merupakan daya tarik wisata.

2) *Accesability* (aksesibilitas)

Accesability dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata. Akses pariwisata di Indonesia sudah lumayan baik namun masih ada yang kurang baik dan belum menunjang akses pariwisata Indonesia. Akses yang baik menunjang akomodasi, karena akomodasi yang mudah didapatkan oleh wisatawan sudah bisa memenuhi apa yang diinginkan wisatawan, walaupun terkadang masih belum mampu menunjang semua kebutuhan wisatawan.

Akses pariwisata di Indonesia masih harus diperbaiki terutama akses transportasi dan telekomunikasi karena merupakan pendukung utama pertumbuhan sektor pariwisata baik transportasi udara, laut, dan darat. Transportasi udara yang menjalin kerja sama terhadap maskapai penerbangan asing memudahkan wisatawan asing keluar dan masuk ke Indonesia. Transportasi laut, seperti diperbaikinya kapal yang berkualitas baik agar wisatawan dengan mudah mengakses pulau-pulau di Indonesia yang mempunyai potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Transportasi darat seperti kereta api yang layak dipakai, bus-bus pariwisata, serta diadakannya angkutan seperti *subway*, *waterway*, *monorail*.

Akses telekomunikasi merupakan strategi pemasaran pariwisata yang efektif seperti publikasi destinasi pariwisata melalui internet untuk mempromosikan pariwisata Indonesia yang berhubungan

dengan objek wisata, hotel, akomodasi, rumah makan, agent travel dan biro perjalanan.

3) *Amenities* (fasilitas)

Amenities memang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih lama di salah satu objek wisata. Biasanya akomodasi yang diinginkan wisatawan berkunjung adalah hotel dan restoran yang mudah dijangkau, serta bisa memenuhi apa yang wisatawan inginkan selama berada di objek wisata yang dikunjunginya.

4) *Ancillary* (kelembagaan)

Adanya lembaga pariwisata, wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari daerah tujuan wisata apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan, (*protection of tourism*) dan terlindungi.

Keempat faktor diatas merupakan faktor yang sangat vital dalam pengembangan suatu destinasi pariwisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa, khususnya perekonomian negara karena kegiatan pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial.

c. Manfaat dan Tujuan Pariwisata

Menurut Pendit (2002), Kepariwisataan dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, proyek sarana budaya dan kelestarian lingkungan, dan sebagainya, yang semuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi wisatawan dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan, maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat

memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, di mana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan di tengah-tengah industri lainnya.

Adapun yang menjadi manfaat Pariwisata adalah :

- 1) Meningkatkan hubungan yang baik antar bangsa dan negara;
- 2) Membuka kesempatan kerja serta perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat;
- 3) Merangsang dan menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat;
- 4) Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, pendapatan daerah, dan devisa negara;
- 5) Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan
- 6) Membantu dan menunjang gerak pembangunan, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan;
- 7) Menjaga kelestarian flora, fauna, dan lingkungan.

Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah:

- 1) Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- 2) Memupuk rasa cinta tanah air;
- 3) Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- 4) Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- 5) Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

3. Hakikat Destinasi Wisata

Menurut UU RI No. 10 Tahun 2009, Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif

yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pitana & I ketut Surya Diarta (2009) mengemukakan bahwa Destinasi Pariwisata merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit).

Legawa (2008) mengemukakan bahwa Destinasi pariwisata adalah suatu entitas yang mencakup wilayah geografis tertentu yang didalamnya terdapat komponen produk pariwisata (attraction, amenities, accebilities) dan layanan, serta unsur pendukung lainnya (masyarakat, pelaku industri pariwisata, dan institusi pengembang) yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan serta totalitas pengalaman kunjungan bagi wisatawan.

4. Hakikat Mitigasi Bencana

a. Hakikat Mitigasi

Menurut Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 (2008), Mitigasi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana melalui peningkatan kualitas fisik dan peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan peredaman atau dikenal dengan istilah Mitigasi. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (*man-made disaster*).

Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena

bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurut Djauhari Noor (2012), Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Dalam UU No. 24 Tahun 2007, usaha mitigasi dapat berupa prabencana, saat bencana dan pasca bencana. Prabencana berupa kesiapsiagaan atau upaya memberikan pemahaman pada penduduk untuk mengantisipasi bencana, melalui pemberian informasi, peningkatan kesiagaan kalau terjadi bencana ada langkah-langkah untuk memperkecil resiko bencana.

Menurut Permendagri (2006), Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu: 1) tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana, 2) sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana, 3) mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan 4) pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Menurut Rachmawatie (2016), Adapun tujuan utama dari mitigasi bencana adalah: 1) mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana dari korban jiwa kematian, kerugian ekonomi dan kerusakan sumber

daya alam, 2) sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan, 3) meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak bencana, sehingga masyarakat merasa aman.

1) Mitigasi yang Efektif

Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan. Penilaian bahaya (*hazard assessment*) diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya.

Peringatan (*warning*) diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.

Persiapan (*preparedness*) Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah-

langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha teknis untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).

2) Tindakan Mitigasi

Menurut peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah:

- a) Penyusunan peraturan perundang-undangan
- b) Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah.
- c) Pembuatan pedoman/standar/prosedur
- d) Pembuatan brosur/leaflet/poster
- e) Penelitian / pengkajian karakteristik bencana
- f) Pengkajian / analisis risiko bencana
- g) Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana
- h) Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum
- i) Pengarus-utamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain:

- a) Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana.

- b) Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
- c) Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
- d) Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
- e) Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
- f) Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.
- g) Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya. (BNPB, 2008)

Sedangkan menurut Rachmawatie (2016) Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu di lakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya, yakni mengurangi dan atau meniadakan korban serta kerugian yang mungkin timbul. Maka, titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu kegiatan mitigasi.

Adapun tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a) Membangun rumah bertiang menopang atap lebih rapat (yang dibantu dengan tiang diagonal), dianjurkan beratap seng agar tahan panas akibat lontaran batu pijar, kemiringan atap tidak lebih dari 45 derajat.
- b) Menyebar luaskan peta kerawanan bencana tanah longsor dan informasi. Penyebaran tersebut disampingkan kepada masyarakat umum atau komunitas yang menghadapi risiko. Caranya melalui penggunaan format yang sesuai dan dilakukan secara periodik.

- c) Menyusun peta (sketsa) risiko bencana tanah longsor di tingkat kampung.
- d) Berpartisipasi aktif dalam merencanakan, membangun sarana dan prasarana pengungsian serta shelter ternak.
- e) Melakukan penanaman hutan kembali untuk mengurangi risiko terjadinya banjir lahar, erosi dan gerakan massa.
- f) Mengadakan pelatihan cara pembuatan pakan ternak awetan, karena besar kemungkinan hijauan makan ternak tertutupi abu vulkanik.
- g) Memperkuat kelembagaan di tingkat masyarakat sebagai bahan manajemen bencana berbasis masyarakat dengan dukungan pemerintah, dunia usaha dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
- h) Membuat peraturan adat atau desa tentang penanggulangan bencana.
- i) Menyusun petunjuk operasional penanggulangan bencana tanah longsor di tingkat kampung dan pemukiman.
- j) Memperbarui rencana kegawat daruratan dengan gladi atau latihan penyelamatan dan tanggap darurat yang melibatkan masyarakat.
- k) Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait secara rutin.

5. Hakikat Bencana Tanah Longsor

a. Hakikat Bencana

Menurut IRBI (2013), Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan

dampak psikologis. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta terror.

b. Hakikat Tanah Longsor

Menurut Karnawati (2005) menjelaskan bahwa pergerakan tanah/batuan pada lereng dapat terjadi akibat interaksi pengaruh beberapa kondisi yang meliputi kondisi morfologi, geologi, struktur geologi, hidrogeologi dan tata guna lahan. Kondisi-kondisi tersebut saling berpengaruh sehingga mengkondisikan suatu lereng menjadi rentan dan siap bergerak. Lereng yang rentan dan siap bergerak akan benar-benar bergerak apabila ada faktor pemicu gerakan. Faktor pemicu terjadinya gerakan dapat berupa hujan, getaran-getaran atau aktivitas manusia pada lereng, seperti pemotongan dan penggalian, pembebanan yang berlebihan dan sebagainya.

Menurut Djauhari Noor (2012), Gerakan tanah atau longsor adalah proses perpindahan masa batuan/ tanah akibat gaya berat (gravitasi). Longsoran tanah telah lama menjadi perhatian ahli geologi karena dampaknya banyak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda. Tidak jarang pemukiman yang dibangun di sekitar perbukitan kurang memperhatikan masalah kestabilan lereng, struktur batuan, dan proses proses geologi yang terjadi di kawasan tersebut sehingga secara

tidak sadar potensi bahaya longsor tanah setiap saat mengancam jiwanya.

Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya longsor tanah adalah daya ikat (kohesi) tanah/batuan yang lemah sehingga butiran-butiran tanah/batuan dapat terlepas dari ikatannya dan bergerak ke bawah dengan menyeret butiran lainnya yang ada disekitarnya membentuk massa yang lebih besar. Lemahnya daya ikat tanah/batuan dapat disebabkan oleh sifat kesarangan (porositas) dan kelolosan air (permeabilitas) tanah/batuan maupun rekahan yang intensif dari masa tanah/batuan tersebut. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempercepat dan menjadi pemicu longsor tanah dapat terdiri dari berbagai faktor yang kompleks seperti kemiringan lereng, perubahan kelembaban tanah/ batuan karena masuknya air hujan, tutupan lahan serta pola pengolahan lahan, pengikisan oleh air yang mengalir (air permukaan), ulah manusia seperti penggalian dan lain sebagainya.

6. Hakikat Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Adisasmita (2015) partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Astuti (2009) mengelompokan partisipasi masyarakat, yakni:

- a) Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Partisipasi yang memberikan arahan pada masyarakat dalam mengemukakan pendapat atau aspirasinya dalam menilai rencana suatu kegiatan. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menimbang suatu keputusan yang akan diambil

b) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dengan mengikutsertakan dalam kegiatan operasional berdasarkan rencana yang telah disepakati bersama

c) Partisipasi dalam menikmati hasil

Partisipasi masyarakat dalam menggunakan dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, baik pemerataan kesejahteraan dan fasilitas yang ada dimasyarakat

d) Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan dan memelihara hasil pembangunan yang dicapai



B. Penelitian Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Mauizatul Hasanah, 2017. Universitas Hasanuddin Makassar	Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maroa Provinsi Sulawesi Selatan)	Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata alam Rammang-Rammang dikelola langsung oleh masyarakat. Kehadiran wisata alam Rammang-Rammang diawali dengan tujuan menolak tambang, tindakan ini sebagai tindakan rasional instrumental. Masyarakat Rammang-Rammang menolak kegiatan penambangan di kawasan karst Desa Salenrang untuk menyelamatkan lingkungan dan potensi alam yang masih terjaga. Hambatan utama yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat serta kendala anggaran dalam pengembangan wisata alam Rammang-Rammang, strategi pengelolaan wisata alam Rammang-Rammang berbasis masyarakat yang dipelopori oleh kelompok sadar wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk memperbaiki sumber daya manusia dan juga memperbaiki kehidupan mereka.
2.	Rizki Parhani, 2016. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Kota Tua Jakarta Berbasis Masyarakat	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan Objek Wisata Kota Tua Jakarta berbasis masyarakat belum baik. Dalam perencanaan masyarakat belum berperan aktif dalam perumusan perencanaan, koordinasi pun belum sampai kepada masyarakat ataupun komunitas-komunitas. Masyarakat hanya dilibatkan dalam pengarah dan pengawasan. Selain itu belum adanya dana dari Pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan komunitas-komunitas yang berpotensi mengenalkan Kota Tua Jakarta kepada masyarakat luas dan menjadi ciri khas Kota Tua Jakarta. Sarannya Pemerintah DKI Jakarta lebih melibatkan secara aktif komunitas dalam perumusan perencanaan dan memasukkan komunitas kedalam kegiatan-kegiatan didalam perencanaan, diberikan pelatihan dan diberdayakan.
3.	Fachri Ramadi, 2016. Universitas Maritim Raja Ali Haji	Strategi Pengelolaan Objek Wisata Istana Kota Rebah Sungai Carang oleh	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan yakni : 1. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang terhadap pengelolaan objek wisata Istana Kota Rebah ini sudah cukup baik dengan melakukan

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang		<p>beberapa upaya yaitu dengan melakukan promosi, pengadaan sarana dan prasarana serta infrastruktur, pemberian dan penyampaian informasi melalui forum-forum resmi berdasarkan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta meningkatkan sumber daya dan kemampuan terhadap pengelolaan objek wisata Istana Kota Rebah. 2. Melaksanakan program guna meningkatkan kesadaran dan perekonomian masyarakat dengan membentuk kelompok sadar wisata. 3. Adanya kerjasama dengan SKPD terkait yaitu Dishub, AP2KE, Provinsi, terhadap pengelolaan objek wisata Istana Kota Rebah.</p> <p>Perlu adanya pengembangan informasi, sarana dan prasarana, serta pemeliharaan lingkungan terhadap objek wisata Istana Kota Rebah agar wisatawan yang datang dapat menikmati kegiatan wisatanya dengan aman dan nyaman.</p>
4.	Hanifah Nur Insani, 2018. Universitas Negeri Jakarta	Analisis Mitigasi Bencana Letusan Gunung Gede di Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Deskriptif, pendekatan survey	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana yang tergolong mitigasi pasif termasuk dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 46,6% yaitu pada indikator pembuatan peta risiko atau peta zona bahaya letusan Gunung Gede dan membentuk organisasi atau lembaga kebencanaan. Untuk upaya mitigasi aktif juga tergolong dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 42,3% yaitu ada indikator pelatihan dasar kebencanaan dan penyuluhan tentang kesiapan menghadapi bencana alam, pemantauan aktifitas Gunung Gede dan indikator lahan untuk mengalirkan lahar. Namun masih ada yang perlu diperhatikan yaitu peta risiko bencana atau peta zona bahaya bencana letusan Gunung Gede perlu di sosialisasikan kepada masyarakat serta dikaji ulang. Hal ini dikarenakan tutupan lahan berupa pemukiman yang ada disekitar daerah rawan bencana semakin bertambah. Selain itu diperlukan upaya pelatihan kebencanaan kepada seluruh masyarakat.</p> <p>Mitigasi pasif yang dilakukan oleh masyarakat masuk dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 43,3% yaitu dalam indikator Dalam mitigasi pasif ini hanya indikator pengetahuan masyarakat mengenai pengetahuan ketersediaan peta risiko atau peta</p>

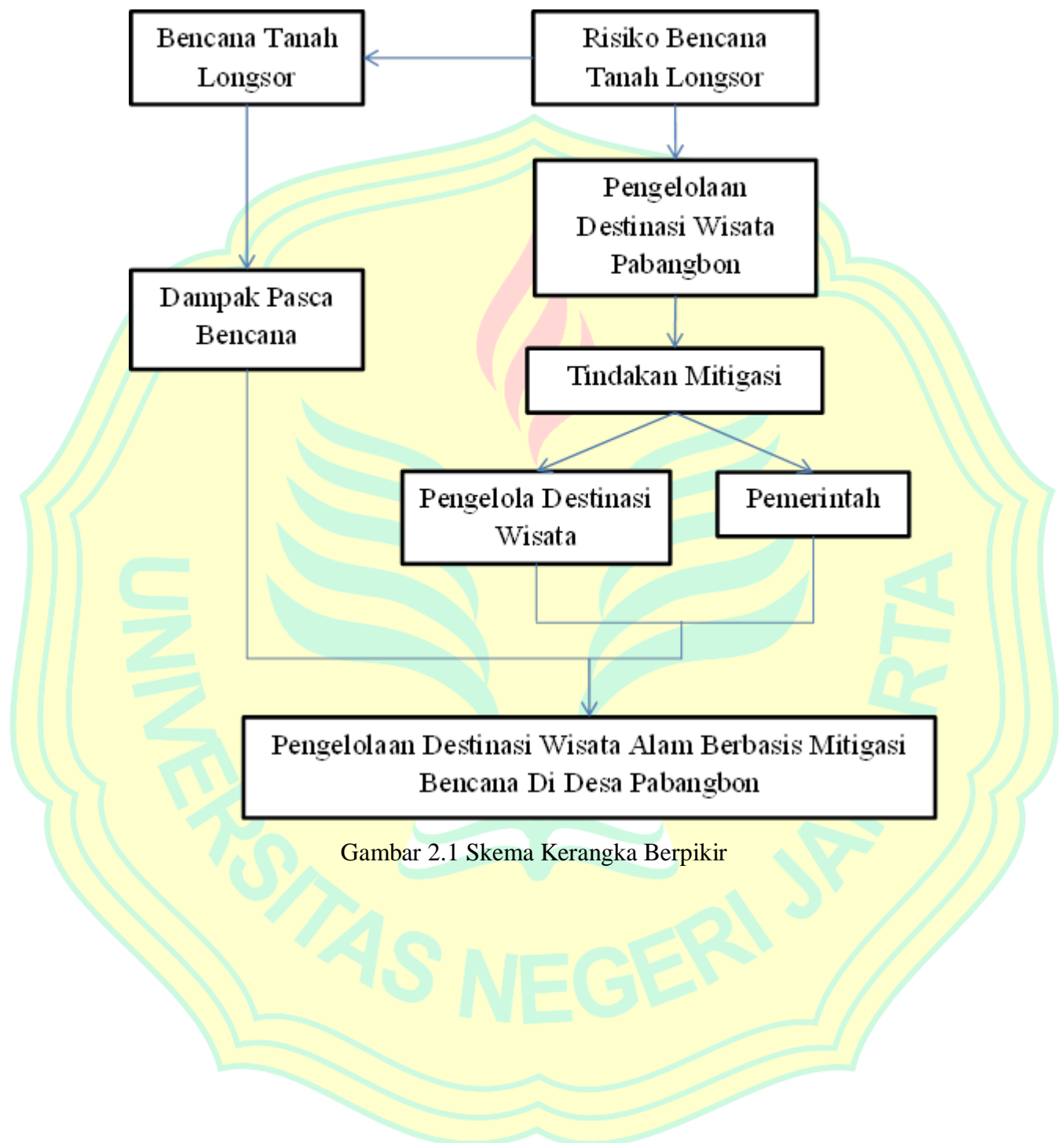
No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
				<p>zona bahaya dan keberadaan lembaga kebencanaan. Sedangkan mitigasi aktif dalam kategori rendah dengan persentase 31,1% dikarenakan semua indikator dalam upaya masyarakat masih rendah. Masyarakat yang tinggal di Desa Cimacan hanya sebatas mengetahui adanya peta risiko bencana dan mengetahui keberadaan lembaga kebencanaan. Masih diperlukan informasi dan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terkait bencana untuk meng edukasi masyarakat agar risiko bencana bisa berkurang dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana tidak besar.</p>
5.	Hertine M. Kesaulya, 2016. Universitas Sam Ratulangi Manado	Perencanaan Mitigasi Bencana Longsor di Kota Ambon	Deskriptif	<p>Analisis tingkat kerawanan dilakukan dengan memberikan skoring pada tiap-tiap parameter. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui persebaran tingkat kerawanan longsor di Kota Ambon, yang dibagi meenjadi tiga tingkat kerawanan yaitu tingkat kerawanan tinggi, tingkat kerawanan sedang dan tingkat kerawanan rendah, yang selanjutnya diklasifikasikan lagi berdasarkan tipologi zona daerah rawan longsor. Berdasarkan hasil analisis tingkat kerawanan maka dapat diusulkan perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang berupa arahan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor dan strategi penanganannya.</p>

C. Kerangka Berpikir

Desa Pabangbon yang berada di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor merupakan daerah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor. Tentunya harus selalu siaga dalam menghadapi dampak bencana tanah longsor yang merugikan banyak pihak, sehingga penting mencegah sejak dini untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi.

Destinasi wisata alam Pabangbon tentunya sudah memiliki pengelolaan tersendiri dalam mengelola destinasi wisata agar daya tarik pengunjung meningkat serta kenyamanan dalam berwisata. Namun destinasi wisata alam Pabangbon yang berada di Desa Pabangbon memiliki tingkat kerentanan tinggi serta risiko yang tinggi terhadap bencana tanah longsor. Sehingga pihak pengelola wisata diharapkan memiliki tindakan mitigasi yang mampu meminimalisir kerugian akibat bencana tanah longsor demi kenyamanan dan keamanan pengunjung selama berkunjung ke destinasi wisata alam Pabangbon.

Selain tindakan dari pihak pengelola, pemerintah juga memiliki peran dalam tindakan mitigasi. Dengan membentuk peraturan tentang bencana hingga penanggulangan bencana serta pelatihan kepada pihak pengelola wisata terkait mitigasi bencana tanah longsor yang diterapkan pada pengelolaan destinasi wisata alam sehingga mampu meminimalisir kerugian akibat bencana.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir